

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang dirumuskan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan Misi dan mencapai Visi berdasarkan Renstra Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- b. Mempercepat terwujudnya kemitraan dengan pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- d. Meningkatkan relevansi dengan instansi teknis terkait dalam Penanganan Pasca Bencana.
- e. Mempercepat terpenuhinya pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- f. Mempercepat proses pengolahan data dan informasi Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas dan berkapsitas.
- h. Meningkatkan Kohesivitas Sosial Masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan dan kualitas pelayanan bagi korban bencana.

- b. Terwujudnya kemitraan dengan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
- c. Terciptanya relevansi dengan instansi teknis terkait dalam Penanganan bencana mulai dari Pra-bencana Saat-bencana dan Pasca-bencana.
- d. Terpenuhinya pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- e. Tersedianya data dan informasi Bencana secara akurat.
- f. Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- g. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan indikator kinerja setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2018 - 2023

MISI : 1. Memantapkan Rasa Aman, Tenram, dan Damai Serta Kehidupan Demokrasi Dalam Memperkuat NKRI		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Kohesivitas Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada c. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Trantibum Tranmas Serta Linmas
MISI : 2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas dan berkapasitas	1. Meningkatnya Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH b. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kerja Pelayanan Internal dan Dukungan Teknis
MISI : 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Baik pada Masa Depan, Sebelum, Saat Terjadi, Maupun Pasca Kejadian Bencana secara Efektif, Efisien, Terkoordinasi, Menyeluruh yang dilandasi oleh Prinsip Kemanusiaan, Kesetaraan dan Keadilan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	1. Pengurangan Resiko Bencana (Pencegahan)	a. Terbangunnya pemahaman dan komitmen pemangku

Penanggulangan Bencana		<p>kepentingan dalam penanggulangan bencana.</p> <p>b. Terbentuknya regulasi daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>c. Tersusunnya rencana penanggulangan bencana.</p> <p>d. Terpetakannya daerah rawan bencana.</p> <p>e. Terpasangnya rambu daerah rawan bencana.</p>
	2. Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana.	<p>a. Rencana Kontijensi</p> <p>b. Tenaga terlatih.</p> <p>c. Relawan penanggulangan bencana.</p> <p>d. Terbentuknya desa tangguh</p> <p>e. Mitigasi terhadap ancaman bencana.</p>
	3. Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	<p>a. Tersedianya logistik bagi masyarakat korban bencana.</p> <p>b. Tersedianya jumlah dan jenis peralatan pendukung penanggulangan bencana.</p> <p>c. Terlaksananya pengelolaan logistik dalam penanggulangan bencana.</p>
	4. Terlaksananya Penanganan : a. Siaga Darurat b. Tanggap Darurat c. Transisi Darurat	<p>c. Terselamatkannya/ berkurangnya jumlah korban bencana.</p> <p>d. Terlayannya masyarakat korban bencana.</p> <p>e. Terlaksananya fungsi-fungsi sarana dan prasarana umum.</p>
	5. Terlaksananya Rehabilitasi Pasca Bencana : a. Manusia b. Fasilitas Umum	<p>a. Terrehabilitasinya masyarakat/manusia korban bencana.</p> <p>b. Terrehabilitasinya fasilitas umum.</p>
	6. Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana	<p>a. Terbangunnya kembali fasilitas umum.</p> <p>b. Terbangunnya kembali rumah bagi masyarakat korban bencana.</p>
MISI : 4. Mewujudkan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Didukung oleh Profesionalitas SDM, Logistik dan Peralatan.		
1	2	3
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Proses Pengolahan Data dan Informasi Bencana	1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi.	<p>a. Persentase jumlah surat menyurat.</p> <p>b. Persentase jumlah bacaan dan aturan perundangan.</p> <p>c. Persentase perawatan</p>

		<p>perengkapan gedung kantor.</p> <p>d. Persentase perawatan gedung kantor.</p> <p>e. Persentase perawatan kendaraan dinas/operasional.</p>
	2. Meningkatnya Kapasitas dan Kedisiplinan SDM Aparatur	<p>a. Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparatur BPBD Provinsi Papua.</p> <p>b. Rata – rata kehadiran pegawai.</p> <p>c. Pelatihan/Bimtek yang dilakukan.</p>
	3. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja	a. Tersusunnya buku pelaporan kinerja, keuangan, SOP, dan Renja.
	4. Meningkatnya Pelayanan Publik	<p>a. Tersedianya peralatan penanggulangan bencana.</p> <p>b. Tersedianya logistik penanggulangan bencana.</p>
MISI : 5. Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pengurangan Resiko Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima di Bidang Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	a. Tersosialisasikannya kegiatan pengurangan resiko bencana.
MISI : 6. Melakukan Upaya Pertolongan dan Penyelamatan serta Merehabilitasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Relevansi dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Pasca Bencana	1. Terlaksananya Penanganan : <p>a. Siaga Darurat</p> <p>b. Tanggap Darurat</p> <p>c. Transisi Darurat</p>	<p>a. Terselamatkannya/berkurangnya jumlah korban bencana.</p> <p>b. Terlayannya masyarakat korban bencana.</p> <p>c. Terpulihkannya fungsi-fungsi sarana dan prasarana umum.</p>
MISI : 7. Melakukan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Terpenuhinya Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1. Terlaksananya Rehabilitasi Pasca Bencana bagi : <p>a. Manusia</p> <p>b. Fasilitas Umum</p>	<p>a. Terrehabilitasinya masyarakat/manusia korban bencana.</p> <p>b. Terrehabilitasinya fasilitas umum.</p>
	2. Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana bagi : <p>a. Manusia</p> <p>b. Fasilitas Umum</p>	<p>a. Terbangunnya kembali fasilitas umum pasca bencana.</p> <p>b. Terbangunnya kembali rumah masyarakat pasca bencana.</p>
MISI : 8. Mewujudkan Penguatan Koordinasi dan Komitmen para Pemangku Kepentingan/ Stakeholder dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Terwujudnya Kemitraan dengan Pemerintah Kab./Kota dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Koordinasi dan Komitmen BPBD se – Provinsi Papua	a. Koordinasi antar BPBD se- Provinsi Papua. b. Terlatihnya bendahara BPBD se- Provinsi Papua. c. Termonevnya program dan kegiatan BPBD se- Provinsi Papua.

Sumber : Renstra BPBD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2023

Adapun secara umum Program Kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua yang diusulkan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran.

Kegiatan :

➤ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan bahan logistik kantor.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
6. Penyediaan barang/material.
7. Fasilitasi kunjungan Tamu.
8. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi kantor, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan.
2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

C. Program Penanggulangan Bencana.

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).

Kegiatan :

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

Kegiatan :

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan :

- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.
3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
4. Penanganan Pasca Bencana Provinsi.

D. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.